

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Buku:

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan (ed.), *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet IX, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Cara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2019.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Karya Ilmiah:

- Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Elvira Dewi Ginting, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (*e-litigation*) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 8, No 2 (2020).
- Annisa, “Analisis Hukum E-litigasi Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol 9, No 2 (2020).
- Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 3, No 2 (2020).

- Bernadette Mulyati Waluyo, “Asas Terbuka Untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”, *Veritas et Justitia*, Vol 6, No 1 (2020).
- Desak Paramita Brata, Ni Putu Rai Yuliarti dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 3, No 1 (2020).
- Herowati Poesoko, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *ADHAPER : Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 1, No. 2 (2015).
- Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih, “Batasan Penerapan Asas Persidangan untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 24, No 3 (2017).
- Miraj Iskandar dan Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019).
- RR. Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19 Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020).
- Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia”, *Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 7, No 3 (2020).
- Zil Aidi, “Implementasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 49, No. 1 (Januari 2020).

Sumber Lainnya:

- Dalih Effendy, *Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-litigasi) Antara Terori dan Praktek Di Pengadilan Agama*, diakses pada 03 Januari 2021, <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543->

pemeriksaan-perkara-secara-elektronik-e-litigasi-antara-teori-dan-praktek-di-pengadilan-agama-i-oleh-dr-drs-h-dalih-effendy-s-h-m-esy-hakim-tinggi-pta-pontianak.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-court, diakses pada Kamis, 8 Oktober 2020, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada Rabu, 21 Oktober 2020. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3944/mulai-2-januari-2020-seluruh-masyarakat-bisa-menggunakan-e-litigasi>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada Senin, 19 Oktober 2020, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.